



Rabu, 15 Juni 2016 06:00

Repo Rp 283 Miliar Masalah Besar



SEMUA bukti-bukti dokumen yang berpotensi adanya keterlibatan pemegang saham juga harus diusut agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam kebawah dan tumpul keatas.

Apa yang diungkap Walikota Ambon Richard Louhenapessy sesuai dipanggil Pansus Bank Maluku terkait repo dan kerugian bank plat merah di tahun 2015 dan anggaran setiap kali RUPS digelar harus menjadi catatan penting bagi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengusut pelbagai kasus di bank itu.

“Saya tidak tahu apakah semua informasi yang disampaikan Walikota telah diketahui Tim Penyidik Kejati Maluku atau sekedar pengalihan isu. Yang terpenting adalah soal angka-angkanya. Ini bisa jadi tantangan baru bagi jaksa,” kata Direktur Eksekutif Institut For Indonesia Integrity (INFIT), Abdul Haji Talaohu ketika dihubungi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam.

Dia mengatakan, pernyataan Walikota yang menyebut masalah kasus saham repo di Bank Maluku lebih besar ketimbang pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya dari perspektif kerugian bank ada benarnya.

Hanya saja, lanjut Ajis, kenapa selaku salah satu pemegang saham terbesar di Bank Maluku, Walikota tidak mempersoalkan masalah ini jauh sebelum kasus pengadaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya berproses diranah penyidikan oleh jaksa.

Atas pernyataan Walikota Ambon, kata Ajis, ada kesan seolah-olah apa yang saat ini ditangani Kejati Maluku terkait kasus pengadaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya bukan masalah yang besar.

“Saya menyimpulkan keterangan atau pernyataan Walikota Ambon terkait Bank Maluku yang saat ini bergulir di meja aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Maluku, seperti itu. Pasalnya, substansi dari pernyataan Walikota itu lebih bernuansa politis,” tandas praktisi hukum jebolan Universitas Hassanudin ini.

Kendati begitu, Ajis mengatakan, pernyataan Walikota Ambon terkait masalah Repo saham merupakan bahan bagi penyidik untuk membuka kasus ini seterang-terangnya dan walikota bisa dijadikan sebagai saksi bagi jaksa.

Selama ini, lanjut Ajis, informasi kasus Repo Saham Bank Maluku, yang sempat ditangani Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku, terkesan kabur soal berapa besar kerugian Bank Maluku di kasus itu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Nah, dengan penjelasan Walikota kepada wartawan selaku salah satu pemegang saham terbesar di Bank Maluku sangat jelas dan terang terkait kerugian ratusan miliar yang memang dananya nihil,” tandas Ajis.

Meski penjelasan Walikota, berbau politis, lanjut Ajis, pernyataan walikota patut dijadikan bahan dan keterangan di kasus Repo yang kini dalam penyelidikan Tim Kejati Maluku. “Jadi kasus Repo dan dana RUPS Bank Maluku yang selama ini begitu besar harus ditelisik aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan,” katanya.

Dengan begitu, apa yang disampaikan Walikota ke publik tidak sekedar wacana kosong untuk mengimbangi pengusutan kasus pembelian lahan dan bangunan di Surabaya. Menurutnya, pengusutan dugaan mark-up telah menetapkan tiga tersangka tidak berhenti sampai disitu.

“Semua bukti-bukti dokumen yang berpotensi adanya keterlibatan pemegang saham juga harus diusut agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam kebawah dan tumpul keatas,” kata Ajis.

Bahkan, pernyataan politis Walikota selaku pemegang saham Bank Maluku yang mengibaratkan masalah lahan dan gedung kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, sebagai masalah kecil tidak harus mengedarkan semangat Tim Penyidik Kejati Maluku dalam mengusut kasus ini.

“Variabel bukti-bukti dokumen di kasus ini pembelian lahan dan gedung di Surabaya harus bergerak diranah penyidikan agar kasus ini tidak berhenti pada tiga tersangka saja. Ini merupakan kunci menuntaskan kasus itu,” tutup Ajis.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Walikota Ambon Richard Louhenapessy menegaskan, masalah repo saham Bank Maluku lebih besar dibanding masalah pembelian kantor cabang BM di Surabaya.

“Ini bukan soal Surabaya, tapi paling serius itu Repo Saham. Itu dananya Rp 238 miliar. Jadi uang ada tapi kenyataannya tidak ada uang. Itu yang paling berat. Ada uang, tapi tidak ada di kas,” bebernya.

Walikota mengungkap, tahun 2016 ini biasanya deviden terbesar setelah BM, adalah Kota Ambon. “Karena kita punya saham nomor dua terbesar di Bank Maluku. Tahun 2015 tidak ada pembagian deviden. Kenapa karena bank mengalami kerugian,” jelasnya.

Selain itu soal rencana digelarnya RUPS BM, Louhenapessy sepertinya tak setuju. Dia mengaku, sesuai AD/ART BM menyebutkan RUPS itu dilaksanakn satu tahun 1 kali. “Kalau ada hal yang urgen bisa dua kali dan tiga kali RUPSL. Sekali RUPS habiskan Rp 400 juta sampai 500 juta sekali RUPS. Hanya sebuah keputusan selalu RUPS. Berapa itu kerugian bank,” tanya dia. **(KTM)**